

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkan dengan menggunakan informasi kinerja yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja dan penggunaan standar satuan harga. Suatu pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) jika telah mempedomani standar satuan harga dan telah menetapkan indikator kinerja dalam proses atau mekanisme penyusunan anggaran.

Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak ada SKPD yang menggunakan 100 % standar satuan harga dilihat dari objek belanja pada masing-masing kegiatan dalam proses penyusunan anggarannya dimana semua analisis menghasilkan angka dibawah 50 %, kecuali pada Dinas Pendidikan tahun 2016 yaitu mencapai 61,60 %.
2. Untuk hasil penilaian indikator kinerja, baik indikator output maupun outcome yang digunakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari sedikitnya kegiatan-kegiatan yang memenuhi semua kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan

perumusan indikator output dan indikator outcome sering diposisikan terbalik. Dengan hasil analisis ini terlihat bahwa masih belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2015 dan tahun 2016.

3. Faktor-faktor atau permasalahan yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia mengakibatkan masih kurangnya pemahaman petugas perencanaan SKPD mengenai indikator kinerja sehingga indikator kinerja yang dirumuskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran baru sebatas melanjutkan apa yang ada tahun sebelumnya tanpa melihat bagaimana kualitasnya.

- b. Kelemahan data kinerja

Kurangnya ketersediaan data yang dibutuhkan pada saat yang tepat menjadi kendala dalam menetapkan angka satuan dari objek belanja dan merumuskan indikator kinerja serta penetapan target kinerja.

- c. Keterbatasan dana

Keterbatasan dana mempengaruhi perilaku aparat perencanaan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menetapkan indikator kinerja pada proses penyusunan anggaran sehingga mengakibatkan belum berjalannya

anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, saran yang dapat diberikan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan penganggaran, terutama pejabat dan staf perencanaan pada setiap SKPD, sehingga dapat menyusun anggaran berdasarkan standar satuan harga dan menyusun indikator kinerja yang memadai dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- 2) Pembuatan dokumen standar satuan harga diterbitkan lebih awal sehingga bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran.
- 3) Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang menjamin ketersediaan data kinerja setiap waktu sehingga perumusan indikator kinerja dapat diformulasikan lebih baik.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi anggaran berbasis kinerja seperti analisis standar belanja (ASB), Standar Pelayanan Minimum (SPM) ataupun Target Kinerja.